



Contents lists available at [Journal IICET](https://journal.iicet.org)

**JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)**

ISSN: 2502-079X (Print) ISSN: 2503-1619 (Electronic)

Journal homepage: <https://jurnal.iicet.org/index.php/jrti>



## Implementasi kebijakan akreditasi madrasah dalam meningkatkan mutu kinerja

Huges Huges<sup>1\*)</sup>, Iim Wasliman<sup>1</sup>, Eva Dianawati<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Nusantara Bandung, Indonesia

### Article Info

#### Article history:

Received Dec 14<sup>th</sup>, 2022

Revised Jan 21<sup>th</sup>, 2023

Accepted Feb 22<sup>th</sup>, 2023

#### Keyword:

Akreditasi  
Implementasi kebijakan  
Madrasah  
Mutu kinerja

### ABSTRAK

Banyak faktor kendala yang dihadapi madrasah belum terakreditasi. diantaranya bagi pemerintah proses akreditasi madrasah tidak bisa dilakukan bersamaan tetapi dilakukan secara bertahap sesuai dengan dana yang dianggarkan sehingga pengajuan akreditasi harus menunggu daftar tunggu. Problema lain adanya kepala madrasah yang belum memahami proses pengajuan akreditasi dan ada juga madrasah yang sudah berakhir masa sertifikasinya tapi belum juga mengajukan permohonan akreditasi ulang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 1) Implementasi kebijakan akreditasi. 2) Pelaksanaan implementasi kebijakan akreditasi 3) Evaluasi implementasi kebijakan akreditasi. 4) Tindak lanjut implementasi kebijakan akreditasi. 5) Masalah yang dihadapi dalam implementasi kebijakan akreditasi dan 6) Solusi masalah yang dihadapi dalam implementasi kebijakan akreditasi. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif dengan studi kasus MAN Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah. Hasil penelitian ini menemukan bahwa implementasi kebijakan akreditasi madrasah dalam meningkatkan mutu kinerja MAN Barito Timur telah diimplementasikan dengan menggunakan pedoman dari BAN S atau M dan dengan menggunakan prinsip manajemen perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, namun masih belum berdampak secara utuh kepada upaya peningkatan mutu kinerja madrasah.



© 2023 The Authors. Published by IICET.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>)

### Corresponding Author:

Huges, H.,  
Universitas Islam Nusantara Bandung, Indonesia  
Email: [huges.sohibmoe@gmail.com](mailto:huges.sohibmoe@gmail.com)

## Pendahuluan

Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Pasal 60 ayat: (1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan; (2) Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah dan atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik. (3) Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka. (4) Ketentuan mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah (Manab, 2013).

Sejalan dengan kegiatan reformasi birokrasi yang ada di lingkungan Kemdiknas demi mewujudkan layanan prima kepada publik, maka layanan akreditasi sekolah atau madrasah menjadi salah satu program dalam reformasi layanan. Reformasi layanan mengacu pada UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik, sehingga mewujudkan sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik. Tujuan yang ingin dicapai dari reformasi layanan akreditasi sekolah atau madrasah ialah memberikan kemudahan kepada pemangku kepentingan dalam mendapatkan layanan akreditasi (Tuerah, 2017).

Akreditasi sekolah yang sebenarnya mempunyai pengertian sebagai proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan dan kinerja lembaga atau suatu program pendidikan dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas publik, alat regulasi diri (self regulation) di mana sekolah mengenal kekuatan dan kelemahan serta terus menerus meningkatkan kekuatan dan memperbaiki kelemahannya (Schles & Robertson, 2019). Pengertian ini akan lebih memberikan makna dalam hasil sebagai suatu pengakuan, suatu sekolah telah memenuhi standar kelayakan yang ditentukan (Taut et al., 2010).

UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, perlu dilakukan pengembangan sekaligus membangun sistem pengendalian mutu pendidikan melalui empat program yang terintegrasi, yaitu standarisasi, evaluasi, akreditasi dan sertifikasi. Standarisasi pendidikan mempunyai makna sebagai upaya penyamaan arah pendidikan secara nasional yang memiliki keleluasan dan keluwesan dalam implementasinya (Gaffar, 2018). Evaluasi merupakan suatu proses kontinu dalam memperoleh data maupun informasi guna pengambilan suatu keputusan (Fitria, 2020). Akreditasi merupakan suatu pengakuan terhadap kinerja sekolah yang diwujudkan dengan adanya sertifikasi yang dikeluarkan suatu lembaga mandiri dan profesional (Hasanah et al., 2020).

Banyak faktor kendala yang dihadapi madrasah belum terakreditasi. diantaranya bagi pemerintah proses akreditasi madrasah tidak bisa dilakukan bersamaan tetapi dilakukan secara bertahap sesuai dengan dana yang dianggarkan sehingga pengajuan akreditasi harus menunggu daftar tunggu (Wene & Muljani, 2020). Problema lain adanya kepala madrasah yang belum memahami proses pengajuan akreditasi dan ada juga madrasah yang sudah berakhir masa sertifikasinya tapi belum juga mengajukan permohonan akreditasi ulang (Moch Arif Burhanudin, Totok Sumaryanto F, 2018).

Dalam Pedoman Akreditasi Madrasah Departemen Agama Republik Indonesia dalam (Wachidi et al., 2020) akreditasi secara terminologi didefinisikan sebagai suatu proses penilaian kualitas dengan menggunakan kriteria baku mutu yang ditetapkan dan bersifat terbuka. Dalam konteks akreditasi madrasah dapat diberikan pengertian sebagai suatu proses penulian kualitas madrasah, baik madrasah negeri maupun swasta dengan menggunakan kriteria baku mutu yang ditetapkan pemerintah atau lembaga akreditasi (Hoque et al., 2020). Hasil penilaian tersebut selanjutnya dijadikan dasar untuk memelihara dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan lembaga yang bersangkutan (Zaqiah et al., 2018).

Akan tetapi penyelenggaraan pendidikan Nasional yang termasuk di dalamnya adalah proses penilaian kelayakan suatu lembaga pendidikan atau yang sering disebut dengan akreditasi, dalam prakteknya masih banyak menuai problem (Haji et al., 2020). Adanya kebijakan-kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah untuk lembaga pendidikan baik yang formal maupun non formal masih menyisakan segudang masalah, diantaranya adalah sering terjadinya ketidakakuratan data yang diperoleh di lapangan dengan realita pada masing-masing satuan pendidikan (Derrington & Campbell, 2018).

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan betapa pentingnya akreditasi sekolah bagi upaya peningkatan produktivitas sekolah serta penjaminan mutu sebuah satuan pendidikan. dalam kenyataan di lapangan bahwa akreditasi sekolah lebih banyak dimaknai untuk memperoleh status dan pengakuan secara formal saja. Sementara makna sesungguhnya belum banyak diketahui dan dilaksanakan secara sungguh-sungguh. Ini terbukti bahwa produktivitas sekolah akan meningkat ketika akan dilakukan kegiatan akreditasi dengan menyiapkan seluruh perangkat administrasi sesuai dengan instrument yang ada, sementara setelah akreditasi berlangsung dan memperoleh sebuah pengakuan maka produktivitas dari komponen sekolah kembali seperti semula. Hal inilah yang menjadi keprihatinan, maka pada tulisan ini penulis akan mempelajari tentang akreditasi dalam meningkatkan produktivitas sekolah.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan di lokus penelitian didapati beberapa permasalahan tentang implementasi kebijakan akreditasi diantaranya keterbatasan atau kurangnya SDM jumlah Guru pada MAN Barito Timur dimana jumlah Guru PNS berjumlah 15 Orang. Dokumen bukti fisik yang diperlukan dalam akreditasi masih acak-acakan tidak sistematis dan tidak jelas keberadaannya.

Selain hal tersebut, problematika lain yang sering terjadi di lapangan adalah pelaksanaan akreditasi yang tidak sesuai dengan prinsip akreditasi yang diantaranya obyektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan (Kulidtod, 2017). Hal ini dipicu oleh adanya kerjasama dari pihak assessor dengan lembaga pendidikan (Derrington & Campbell, 2015). Sehingga prinsip adil dan transparan itu tidak terlaksana dengan baik. Pada pengisian

instrument akreditasi pun masih banyak data yang tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi di lapangan (Sudarjat et al., n.d.). Sesuai dengan yang penulis kemukakan di depan, banyaknya data yang fiktif, banyaknya sarpras yang diada-adakan (M.O. et al., 2016).

Fakta di lapangan yang didapati peneliti adalah adanya realitas pelaksanaan akreditasi saat ini masih belum layak karena masih belum memenuhi kriteria-kriteria yang tertera dalam prosedur akreditasi dan masih terfokus pada jalur pendidikan formal, itupun pelaksanaannya masih mengalami banyak hambatan dengan banyaknya ketidaksesuaian data yang diperoleh dengan kenyataan di lapangan (Effendi et al., 2020). Sering adanya perjanjian antara pihak assessor dengan pihak yang di akreditasi, sehingga tidak adanya akuntabilitas publik (Marmin et al., 2020). Di antara upaya Kementerian Agama dalam menata dan membina madrasah dalam menyelenggarakan pendidikan adalah dengan mendorong kebijakan akreditasi bagi madrasah mulai dari jenjang paling bawah sampai pada jenjang madrasah aliyah (Ahmad et al., 2020).

Berdasarkan beberapa hasil penelitian yang relevan dengan latar belakang permasalahan di atas, diantaranya penelitian (Sanusi, 2020) hasil penelitian akreditasi rata-rata berkisar pada standar tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana serta standar pembiayaan terutama bagi madrasah-madrasah yang statusnya swasta. Oleh sebab itu, Kementerian Agama diharapkan melakukan pembinaan dan pendampingan yang lebih intensif guna mendukung program percepatan akreditasi serta memberikan bantuan secara tepat terkait kelengkapan administrasi dan sarana prasarana pembelajaran.

Penelitian (Hasibuan & Yusuf, 2020) menemukan bahwa pelaksanaan akreditasi diharapkan dapat mendorong atau menciptakan suasana kondusif bagi pertumbuhan pendidikan dan memberikan arahan untuk evaluasi diri yang berkelanjutan, serta sebagai perangsang untuk terus berusaha mencapai mutu yang diharapkan, sehingga secara tidak langsung dapat menjamin mutu pendidikan. Berdasarkan uraian yang disajikan pada latar belakang masalah penelitian, maka penelitian dari itu, ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan akreditasi madrasah dalam meningkatkan mutu kinerja di MAN Barito Timur.

## Metode

Penelitian menggunakan metode studi kasus di MAN Barito Timur (Surur & Roziqin, 2021). pemilihan lokus penelitian dikarenakan MAN Barito Timur memiliki statut akreditasi C. Sedangkan subyek penelitian atau responden penelitian dipilih secara purposive, yaitu informan-informan yang dipilih adalah orang-orang yang cukup mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang berkaitan dengan masalah penelitian. Adapun key informant dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah
2. Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Barito Timur
3. Kelompok Kerja Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Barito Timur
4. Kepala MAN Barito Timur
5. Wakil-Wakil Kepala Barito Timur

## Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara Mendalam

Wawancara dimaksudkan untuk mengungkap data atau informasi mengenai berbagai masalah sebagaimana dirumuskan dalam pertanyaan penelitian. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam merupakan teknik utama dalam penelitian ini. Ada dua bentuk wawancara dalam penelitian ini, yaitu wawancara terfokus dan wawancara bebas (free interview) (Nadhirin, 2018). Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi wawancara, peneliti menggunakan pedoman wawancara, meskipun dalam pelaksanaannya tidak selalu terkait (kaku) dengan pedoman tersebut. Kegiatan ini dilakukan baik pada waktu yang dikhususkan, wawancara partisipatif, maupun bersamaan dengan pelaksanaan observasi, atau pada pertemuan dengan responden secara tidak sengaja (casual interview) (Flores & Derrington, 2017). Kegiatan ini dilakukan dengan menciptakan suasana kondusif, yakni sikap saling percaya, hubungan kemitrasejajaran, dan pemahaman terhadap lingkungan budaya atau lingkungan kerja responden. Kedua metode ini dilakukan secara terbuka (open interview) sesuai dengan sifat penelitian kualitatif yang open ended, dan ditujukan kepada informan-informan tertentu yang dianggap sebagai informan kunci (key informants) serta informan biasa (Eady & Zepeda, 2007).

## 2. Observasi Partisipan

Observasi dilakukan untuk mencermati hal-hal sebagai berikut:

- Keadaan fisik: ruang dan penataannya, ruang kelas beserta perlengkapannya, suasana lingkungan sekolah, benda-benda bersejarah, hiasan, seragam dan motto madrasah.
- Rapat-rapat: rapat rutin intern sekolah (guru dengan kepala sekolah), rapat dinas (sekolah dengan yayasan, rapat dengan orang tua, rapat dengan dewan sekolah, dan rapat lainnya),
- Suasana proses belajar mengajar: kegiatan praktikum, kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler,
- Penerimaan siswa baru, pelepasan lulusan, kegiatan seremonial, kebiasaan memulai dan mengakhiri pelajaran, bahasa, simbol dan tokoh yang berpengaruh di madrasah.

Semua hasil pengamatan dicatat dan direkam sebagai hasil pengamatan lapangan (field note), kemudian akan dilakukan refleksi oleh peneliti. Hal-hal tersebut dikembangkan sesuai dengan fokus dalam penelitian ini. Observasi partisipan dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui dua hal yang berhubungan dengan penelitian ini, yakni manusia dan nonmanusia. Peristiwa dan fenomena yang terjadi di lapangan diamati dan dimaknai secara simultan (Rulitawati et al., 2020). Observasi partisipan merupakan karakteristik interaksi sosial antara peneliti dengan subjek-subjek dalam lingkungan organisasi sekolah. Observasi partisipan dilakukan dalam tiga tahap. Pertama, dimulai dari observasi deskriptif (descriptive observations) secara komprehensif dengan menggambarkan secara umum situasi sosial yang terjadi di ketiga lokasi penelitian. Kedua, observasi terfokus (focused observations) untuk menemukan kategori-kategori, seperti sistem nilai yang dimiliki oleh para pengelola sekolah dan pola-pola perilaku yang mencerminkan budaya mutu organisasi sekolah. Ketiga, observasi selektif (selective observations), bertujuan untuk menganalisis dan mengulangi secara berulang-ulang untuk mencari perbedaan di antara kategori-kategori yang sesuai dengan masalah penelitian, seperti sistem nilai, pola perilaku, perasaan, kebiasaan-kebiasaan, keyakinan, komitmen, dan hal-hal lain yang terkait (Sukmawati et al., 2019).

## 3. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data berupa dokumen-dokumen penting yang sesuai dengan fokus penelitian. Dokumen yang dikumpulkan akan memperkaya data yang dibutuhkan. Dokumen-dokumen akan dianalisis dan dimaknai berkaitan dengan manajemen sekolah unggul. Pelaksanaan studi dokumentasi ini didasarkan pada lima alasan, yaitu:

- Sumber-sumber ini tersedia dan mudah diperoleh di sekolah;
- Dokumen dan rekaman merupakan sumber informasi yang akurat, stabil, dan dapat dikaji kembali;
- Dokumen dan rekaman merupakan sumber informasi yang kaya, secara kontekstual sesuai dan mendasar dalam konteksnya;
- Sumber pernyataan legal yang dapat memenuhi akuntabilitas; dan
- Sumber bersifat nonreaktif, sehingga tidak sukar ditemukan dengan teknik kajian isi.

Prosedur pengumpulan data dalam sistem pendekatan kualitatif menggunakan teknik wawancara tak berstruktur dan pengamatan serta telaahan dokumen berdasarkan data yang bersumber dari fakta di lapangan tentang objek penelitian, kebijakan dan data tentang penelitian hasil proses akreditasi dari kepala penelitian, kebijakan dan data tentang penelitian hasil proses akreditasi dari kepala sekolah, guru dan komite sekolah (Yaumi et al., 2018). Pedoman wawancara bebas tak berstruktur berisikan daftar pertanyaan terbuka dalam dialog lisan secara bebas dan informal dengan informan tentang fakta-fakta dan informasi kemampuan kepala sekolah, guru dan komite sekolah dalam mengimplementasikan hasil-hasil penelitian akreditasi sekolah (Steinberg & Kraft, 2017).

## Hasil dan Pembahasan

### Implementasi Kebijakan Akreditasi MAN Barito Timur Dalam Meningkatkan Mutu Kinerja MAN

Berdasarkan temuan penelitian implementasi kebijakan akreditasi madrasah aliyah dalam meningkatkan mutu kinerja MAN, dalam mempersiapkan proses pengajuan akreditasi, Pimpinan madrasah perlu memperhatikan kebutuhan-kebutuhan madrasah di berbagai jenjang terutama pada standar-standar yang cenderung nilainya lebih rendah dari standar lainnya. Pada standar proses, pemerintah ikut memperhatikan perbaikan kemampuan guru dalam pengembangan KTSP, silabus, dan sistem evaluasi, supervisi dan pengawasan. Sedangkan pada standar tendik komponen yang perlu ditingkatkan diantaranya ketersediaan pendidik, tenaga

perpustakaan, tenaga laboratorium yang kualifikasi dan kompetensinya sesuai dengan standar. Proses peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan madrasah dapat dilihat dari sejauhmana pemenuhan kebutuhan madrasah melalui pencapaian pemenuhan delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Hasil penelitian menunjukkan pada beberapa jenjang madrasah yang sudah terakreditasi masih ditemukan standar yang rendah namun ada juga yang sudah tinggi.

Sekolah atau madrasah sebagai lembaga pendidikan dan tempat untuk belajar dan mengajar akan bermutu ketika lembaga tersebut mendapatkan pengakuan dan penilaian dari beberapa pihak yang berwenang. Pengakuan dan hasil penilaian tersebut dinamakan akreditasi (Koesoemahardja, 2016). Untuk menilai kelayakan suatu program lembaga pendidikan atau satuan pendidikan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan nasional secara bertahap, maka dalam hal ini pemerintah sebagai pihak berwenang melakukan upaya akreditasi, pelaksanaan dimaksud selain dilakukan secara bertahap juga terencana dan terukur sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan (Hidayatullah, 2021).

### **Pelaksanaan Implementasi Kebijakan Akreditasi MAN Barito Timur Dalam Meningkatkan Mutu Kinerja MAN**

Berdasarkan temuan penelitian MAN berakreditasi C, komponen yang masih lemah pada standar kelulusan, standar sarpras, dan standar tendik, sedangkan komponen dengan nilai tertinggi pada standar pembiayaan, dan standar penilaian. Lain hal nya dengan MTs berakreditasi A, standar sarana prasarana merupakan nilai komponen paling rendah, sebaliknya nilai tertinggi pada standar penilaian dan standar isi. Kepala madrasah dalam pelaksanaan implementasi kebijakan akreditasi Madrasah Aliyah dalam meningkatkan mutu kinerja MAN, am mengoptimalkan dan mengakses sumber daya sekolah untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuannya. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan penyusunan program, mendayagunakan sumber daya guru dan tenaga kependidikan, serta mendayagunakan sumber daya sekolah secara unggul. Dalam hal ini, kepala sekolah seyogyanya dapat memfasilitasi dan memberikan kesempatan yang luas kepada guru untuk dapat melaksanakan kegiatan pengembangan profesi melalui berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan, baik yang dilaksanakan di sekolah seperti MGMP atau MGP tingkat sekolah, in house training, diskusi profesional dan sebagainya.

Akreditasi merupakan salah satu pilar penjaminan mutu pendidikan, dalam pelaksanaan akreditasi merupakan suatu proses pemotretan mutu pendidikan. Akreditasi menjadi hal yang penting mengingat fungsi akreditasi sebagai jaminan mutu, pengendalian mutu dan peningkatan mutu. Komponen akreditasi yang dipakai dalam mengukir mutu suatu satuan pendidikan atau program keahlian mengacu kepada 8 Standar Nasional Pendidikan yang meliputi: Standar proses, standar kompetensi. Kelulusan, standar tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, standar pembiayaan, standar penilaian, dan standar pendidikan (Hidayatullah, 2021). Dalam sistem akreditasi, mutu satuan pendidikan ditentukan oleh faktor-faktor yang saling berhubungan satu dengan lainnya meliputi standarisasi proses dan pengelolaan pendidikan, penjaminan mutu, evaluasi dan akreditasi. Umpan balik dari hasil akreditasi pada gilirannya akan bermanfaat dalam proses perbaikan mutu dari suatu satuan pendidikan (Solichin, 2015).

Manfaat pelaporan data dan hasil akreditasi ke sekolah serta laporan akhir hasil kegiatan akreditasi madrasah dapat dijadikan bahan rujukan dalam menyusun rencana kegiatan program ke tahun depan dan dapat dipertanggungjawabkan (Astenia. et al., 2019). Pelaksanaan program akreditasi dilakukan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap hasil kerja. Kegiatan monitoring dan evaluasi internal adalah suatu kegiatan dilakukan untuk pemantauan dan supervisi pembinaan dan penyelesaian masalah terhadap pelaksanaan program akreditasi sekolah/madrasah. Tujuannya melakukan monitoring dan evaluasi untuk menyakinkan bahwa dana program akreditasi diterima oleh yang berhak dalam jumlah, waktu, cara dan penggunaan yang tepat (Siregar & Sihombing, 2021).

### **Evaluasi Implementasi Kebijakan Akreditasi MAN Barito Timur Dalam Meningkatkan Mutu Kinerja MAN**

Berdasarkan temuan penelitian, evaluasi implementasi kebijakan akreditasi Madrasah Aliyah dalam meningkatkan mutu kinerja MAN, Kemampuan melakukan penilaian dan evaluasi. Keterampilan yang tidak kalah pentingnya yang harus dimiliki oleh guru adalah kemampuan melakukan evaluasi. Menurut waktunya, evaluasi dapat dilakukan melalui tiga tahap yakni penilaian di awal, penilaian pada proses dan penilaian di akhir pembelajaran. Penilaian awal ini yang biasa kita kenal dengan istilah pre test, yakni penilaian yang dilakukan sebelum proses belajar mengajar dilakukan, tes ini dimaksudkan untuk mengetahui sampai dimana pemahaman siswa terhadap penguasaan materi yang telah mereka pelajari pada pertemuan sebelumnya. Tes awal ini dimaksudkan agar dapat menentukan apakah guru dapat melanjutkan materi berikutnya ataukah akan mengulangi lagi materi yang sudah diajarkan pada pertemuan sebelumnya (Ensha, 2018).

Dalam rangka menempatkan program akreditasi sebagai bagian dari upaya sekolah atau madrasah untuk meningkatkan mutunya secara berkelanjutan, maka sistem akreditasi dikembangkan dengan karakteristik yang memberikan: (a) Keseimbangan antara fokus penilaian kelayakan dan kinerja sekolah atau madrasah; (b) Keseimbangan antara penilaian internal melalui evaluasi diri oleh sekolah atau madrasah dan evaluasi eksternal oleh asesor. Keseimbangan hasil akreditasi antara pemeringkatan status sekolah atau madrasah dan umpan balik untuk peningkatan mutu sekolah atau madrasah (Sutanti et al., 2022).

Kebijakan akreditasi yang dilaksanakan oleh madrasah sepatutnya dilakukan evaluasi. Evaluasi dalam implementasi kebijakan akreditasi di madrasah umumnya saat madrasah mendapatkan status akreditasi yang diberikan oleh Badan Akreditasi. Dari hasil tersebut tentunya pihak madrasah memiliki kepentingan yang kuat untuk menjadikan predikat akreditasi sebagai bentuk alat evaluasi kebijakan madrasah secara menyeluruh. Sehingga tindakan tersebut sesuai dengan teori evaluasi kebijakan, di mana evaluasi kebijakan adalah kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak (Arifudin, 2019). Evaluasi kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja melainkan kepada seluruh proses kebijakan

### **Tindak Lanjut Implementasi Kebijakan Akreditasi MAN Barito Timur Dalam Meningkatkan Mutu Kinerja MAN**

Berdasarkan temuan penelitian tindak lanjut implementasi kebijakan akreditasi Madrasah Aliyah dalam meningkatkan mutu kinerja MAN penyelenggaraan akreditasi sebagai salah satu kegiatan peningkatan mutu di bidang pendidikan, pada hakikatnya adalah agar penyelenggaraan pendidikan dapat mencapai standar kualitas yang ditetapkan dan pada gilirannya peserta didik dapat mencapai keberhasilan baik dalam penguasaan ilmu pengetahuan, keterampilan maupun dalam pembentukan kepribadian. Tindak lanjut implementasi kebijakan akreditasi MAN Barito Timur dalam meningkatkan mutu kinerja, dilakukan guna melakukan perbaikan pada nilai-nilai standar yang masih rendah, namun masih terkendala dalam ketersediaan sarana prasarana, standar lulusan yang belum menunjang dalam meningkatkan mutu kinerja MAN. Hasil wawancara yang dilakukan menunjukkan bahwa hasil evaluasi implementasi kebijakan akreditasi MAN Barito Timur Hasil akreditasi sekolah atau madrasah yaitu: 1) Acuan dalam upaya peningkatan mutu sekolah atau madrasah dan rencana pengembangan sekolah atau madrasah. 2) Umpan balik dalam usaha pemberdayaan dan pengembangan kinerja warga sekolah atau madrasah dalam rangka menerapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program sekolah atau madrasah. Motivator agar sekolah atau madrasah terus meningkatkan mutu pendidikan secara bertahap, terencana, dan kompetitif baik ditingkat kabupaten, provinsi, nasional bahkan regional dan internasional (Solichin, 2015).

Bahan informasi bagi sekolah atau madrasah sebagai masyarakat belajar untuk meningkatkan dukungan dari pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta dalam hal profesionalisme, moral, tenaga, dan dana. Acuan bagi lembaga terkait dalam mempertimbangkan kewenangan sekolah atau madrasah sebagai penyelenggara ujian nasional. Hasil akreditasi berupa: 1) Sertifikat Akreditasi Sekolah dalam bentuk surat yang menyatakan pengakuan dan penghargaan terhadap sekolah atas status dan kelayakan sekolah melalui proses pengukuran dan penilaian kinerja sekolah terhadap komponen-komponen berdasarkan standar yang ditetapkan BAN-SM untuk jenjang pendidikan tertentu. 2) Profil sekolah, kekuatan dan kelemahan, dan rekomendasi.

### **Masalah Yang Dihadapi Dalam Implementasi Kebijakan Akreditasi MAN Barito Timur Dalam Meningkatkan Mutu Kinerja MAN**

Berdasarkan hasil temuan, hambatan yang dihadapi adalah keterbatasan pengalaman dan pengetahuan, kompetensi guru yang berbeda sehingga saat di berikan arahan ada yang cepat mengerti ada pula yang tidak, pelajari dalam pelaksanaan administrasi di Madrasah, masalah waktu, dimana, terkadang pelaksanaan supervisi berbentrok waktunya, masih banyak inovasi inovasi yang belum dapat di terima oleh stakeholders Madrasah, dan keterbatasan dana. Penelitian ini juga menemukan bahwa masalah yang dihadapi dalam implementasi kebijakan akreditasi Madrasah Aliyah dalam meningkatkan mutu kinerja MAN, diantaranya: (1) Kegiatan-kegiatan pelatihan untuk peningkatan kapasitas masih sangat sedikit dilaksanakan oleh lembaga, (2) Kerjasama dengan lembaga-lembaga selain kemenag dan Pemerintah Kabupaten masih belum banyak dilakukan; (3) Motivasi para pelaksana pendidikan belum optimal, (4) Para pelaksana pendidikan masih disibukkan dengan rutinitas di luar tugas pokoknya sebagai guru

Masalah lain yang dihadapi dalam implementasi kebijakan akreditasi MAN Barito Timur masalah yang terkait dengan kejujuran atau obyektivitas, program dan satuan pendidikan kurang jujur dalam mengevaluasi dirinya, sehingga peringkat mutu yang ada dan dipublikasikan selama ini belum sepenuhnya terpercaya, hasil akreditasi yang dilakukan oleh badan akreditasi terhadap satuan pendidikan, belum mencerminkan

kenyataan yang sesungguhnya. Sikap kompromi dan pertimbangan-pertimbangan subyektif (tetapi merasa perlu ditempuh) masih turut berbicara dalam kegiatan akreditasi. Kegiatan penjaminan mutu kurang ditopang aspek pembiayaan yang memadai, sehingga mengganggu tingkat kejujuran, obyektivitas, profesionalitas, dan kesungguhan kerja unit penjaminan mutu dan badan akreditasi, dan Kurangnya fasilitas pendukung PBM bagi peserta didik dan tenaga pendidik (Hidayatullah, 2021). Selain itu terkait fakta di lapangan ditemukan, seringkali sekolah yang kurang sungguh-sungguh dalam melaksanakan pendidikan merasa keberatan dengan adanya akreditasi. Sehingga pada saat waktunya akreditasi, para guru mengerjakan bukti-bukti autentik melalui jalan pintas. Ada yang membayar seseorang untuk mengerjakan data-data terkait, ada pula yang dikerjakan sendiri dengan melembur berhari-hari dan banyak data-data yang dimanipulasi seperti peralatan laboratorium, komputer, buku perpustakaan ataupun peralatan UKS.

Sekolah yang dikelola dengan baik dari segi pembelajaran, sumber daya manusia dalam hal ini pendidik serta manajemennya maka sekolah akan menghasilkan output (siswa) yang berkualitas yang mampu bersaing ditempat yang lebih besar tantangannya dan lebih komplek (Siswanto, 2022). Sekolah yang manajemennya kurang baik tidak akan memberikan kualitas dan lulusan yang baik. Sekolah yang tidak terkelola dari segi sistem pembelajaran dan manajemennya sehingga sekolah tersebut tidak maju dan tidak mampu bersaing dalam dunia globalisasi saat ini dan dimasa mendatang.

### **Solusi Masalah Yang Dihadapi Dalam Implementasi Kebijakan Akreditasi MAN Barito Timur Dalam Meningkatkan Mutu Kinerja MAN**

Solusi untuk mengatasi masalah yang dihadapi dalam implementasi kebijakan akreditasi MAN Barito Timur dalam meningkatkan mutu kinerja MAN menetapkan beberapa rancangan strategi melakukan perbaikan terus menerus dan berkesinambungan terutama dalam memperbaiki kualitas tamatan. Berdasarkan hasil temuan, solusi dari masalah yang dihadapi dalam implementasi kebijakan akreditasi MAN Barito Timur menyatakan pihak sekolah pada dasarnya selalu berupaya untuk meningkatkan akreditasi sekolahnya dengan tujuan agar sekolahnya mendapat peringkat akreditasi yang lebih baik dari nilai akreditasi pada lima tahun sebelumnya. Oleh karena itu pihak sekolah berusaha mempersiapkan dengan baik semua hal yang di perlukan dalam akreditasi sekolah, mulai dari tahap persiapan sampai pada tahap pelaksanaan akreditasi sekolah.

Selanjutnya menurut informasi dari sumber lain menyebutkan Tim akreditasi MAN Barito Timur terlebih dahulu mengadakan rapat sosialisasi pengisian instrumen akreditasi dan Instrumen Pengumpulan Data dan Informasi Pendukung (IPDIP) tersebut. Dalam rapat itu dibagikan lembaran petunjuk teknis dan lembaran isian instrumen ke masing-masing tim standar akreditasi. Dalam rapat juga dibahas poin-poin yang tidak dimengerti oleh masing-masing tim standar akreditasi. Setiap tim diwajibkan mengisi dengan jangka waktu yang telah di tetapkan. Setelah diisi, lembaran instrumen akreditasi dan Instrumen Pengumpulan Data dan Informasi Pendukung (IPDIP) tersebut harus diserahkan ke operator sekolah untuk diisi ke aplikasi Sispena. Dengan upaya itu Madrasah berupaya agar implemmentasi akreditasi dilaksanakan dengan baik oleh madrasah, tidak ada upaya jalan pintas, dan tidak ada manipulasi data yang dilakukan oleh pihak sekolah (Novitasari et al., 2022).

Tuntutan peningkatan mutu suatu produk atau layanan jasa termasuk pendidikan oleh pelanggan terus menerus berkembang dan meningkat dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun dan dari jaman ke jaman. Masyarakat semakin cerdas dalam memilih lembaga pendidikan yang berkualitas. Oleh karena itu, sekolah atau madrasah sebagai penyelenggara lembaga pendidikan tidak bisa mengelola pendidikan tanpa adanya manajemen yang baik. Lembaga pendidikan tanpa inovasi kreativitas akan menjadi statis karena tidak ada upaya perbaikan berkesinambungan dalam memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat (Marlina et al., 2021).

### **Simpulan**

Implementasi kebijakan akreditasi untuk meningkatkan mutu kinerja pada MAN Barito Timur dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan yang diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Dalam implementasi kebijakan tersebut madrasah masih dihadapkan pada berbagai kendala terutama dalam pemberdayaan sumberdaya sarana prasarana yang belum cukup memadai, sehingga implementasi kebijakan akreditasi belum dapat meningkatkan mutu kinerja madrasah secara keseluruhan. Sementara kesimpulan secara khusus yaitu (1) Kebijakan akreditasi MAN Barito Timur dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku, namun dalam beberapa aspek masih belum terlaksana sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Madrasah hanya menjadikan akreditasi sebagai kegiatan rutinitas 4 tahunan pada saat memperbaharui predikat akreditasi. (2)

Implementasi kebijakan akreditasi MAN Barito Timur belum menunjukkan kualitas kinerja madrasah yang sesungguhnya. Madrasah masih menghadapi berbagai kendala terutama dalam pemberdayaan sumberdaya sarana prasarana, sumberdaya pendidik, dan tata kelola administrasi pendidikan. (3) Pengawasan dan evaluasi kebijakan akreditasi MAN Barito Timur telah melakukan pengawasan dan evaluasi secara berjenjang, pengawasan dan evaluasi kebijakan akreditasi Madrasah Tsanawiyah belum dijadikan sebagai rujukan dalam melakukan Evaluasi Diri Madrasah guna melakukan perbaikan kinerja secara terus menerus.

## Referensi

- Ahmad, A., Gistituati, N., & Rusdinal. (2020). Management of the Madrasah Principal to Get "A" Accreditation in MTSN 1 Sijunjung. *Proceedings of the 2nd International Conference Innovation, 504(ICoIE)*, 185–188.
- Arifudin, O. (2019). Manajemen Sistem Penjaminan Mutu Internal (Spmi) sebagai upaya meningkatkan mutu perguruan tinggi. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi)*, 3(1), 161–167.
- Astenia., D., Rugaiyah., & Neti Karnati. (2019). The Evaluation Of The School Madrasah Accreditation Program Implmentation In Kota Palembang. *Indonesian Journal of Educational Review*, 6(1), 22–34.
- Derrington, M. L., & Campbell, J. W. (2015). Implementing new teacher evaluation systems: Principals' concerns and supervisor support. *Journal of Educational Change*, 16(3), 305–326.
- Derrington, M. L., & Campbell, J. W. (2018). High-stakes teacher evaluation policy: US principals' perspectives and variations in practice. *Teachers and Teaching*, 24(3), 246–262.
- Eady, C. K., & Zepeda, S. J. (2007). Evaluation , Supervision , and Staff Development under Mandated Reform : The Perceptions and Practices of Rural Middle School Principals 2-The Rural Educator. *The Rural Educator*, 28(2), 1–7.
- Effendi, R., Lian, B., & Sari, A. P. (2020). Principal Leadership Policy in Improving Instructional Quality. *International Journal of Progressive Sciences and Technologies (IJPSAT)*, 368–375.
- Ensha, I. S. (2018). Pengaruh Implementasi Kebijakan Akreditasi Puskesmas terhadap Manajemen Pelayanan Kesehatan Masyarakat dalam Mewujudkan Produktivitas Kerja. *Jurnal Publik : Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara*, 12(01), 12–23.
- Fitria, H. (2020). The Implementation of Class Supervision and Its Positive Impact. *Journal of Social Work and Science Education*, 1(2), 146–160.
- Flores, M. A., & Derrington, M. L. (2017). School principals' views of teacher evaluation policy: lessons learned from two empirical studies. *International Journal of Leadership in Education*, 20(4), 416–431.
- Gaffar, B. (2018). Strategies of Madrasah Development Center through the Implementation of Madrasah Accreditation Acceleration Program in South Sulawesi. *Journal of Research & Method in Education*, 8(2), 28–37.
- Haji, S., Lian, B., & Fitriani, Y. (2020). An Evaluation Of School Operational Fund Program. *International Journal of Educational Review*, 2(2), 212–221.
- Hasanah, A., Nonitasari, I., & Habibah, H. (2020). Madrasah Head Policy in Improving the Quality of Teacher Profession. *International Journal for Educational and Vocational Studies*, 2(12), 1024–1029.
- Hasibuan, L., & Yusuf, M. (2020). *Education Personnel Management Model for Improving the Performance of Public Madrasah Aliyah Teachers in Jambi Province*. 23(2), 9.
- Hidayatullah, A. (2021). Kebijakan implementasi akreditasi dalam peningkatan mutu pendidikan di mts ibad ar rahman islamic boarding school cimanuk pandeglang. *Journal Abacus*, 2(1), 1–16.
- Hoque, K. E., Bt Kenayathulla, H. B., D/O Subramaniam, M. V., & Islam, R. (2020). Relationships Between Supervision and Teachers' Performance and Attitude in Secondary Schools in Malaysia. *SAGE Open*, 10(2).
- Koesoemahardja, N. F. (2016). Analisis Kesiapan Akreditasi Dasar Puskesmas Mangkang Di Kota Semarang. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*.
- Kulidtod, Z. D. (2017). Islamic Educational Policies in the Philippines: Its Evolution and Current Problems. *Educational Journal*, 1(1).
- M.O., A., A.O., O., & W.F., W. (2016). Teachers' Performance Evaluation in Higher Educational Institution using Data Mining Technique. *International Journal of Applied Information Systems*, 10(7), 10–15.
- Manab, A. (2013). The Implementation of Curriculum Diversification of Madrasah Aliyah Darul Hikmah , Tulungagung , Indonesia. *The Implementation of Curriculum Diversification of Madrasah Aliyah Darul Hikmah , Tulungagung , IndonesiaJournal of Education and Practice*, 4(18), 64–70.
- Marlina, S., Harapan, E., & Kesumawati, N. (2021). Implementation of the internal quality assurance system (SPMI) in junior high school. *JPGI (Jurnal Penelitian Guru Indonesia)*, 6(2), 508.

- Marmin, M., Koderi, K., Muin, J. A., & Fahri, J. (2020). *The Effectiveness of Supervision Program At Madrasah Aliyah in Pesawaran Regency*. 10.
- Moch Arif Burhanudin, Totok Sumaryanto F, S. (2018). Implementation of Integrated Quality Management in Improving The Quality of Education At Madrasah Aliyah Raudlatul Ulum. *Educational Management*, 7(1), 1–10.
- Nadhirin, N. (2018). Teaching Supervision of Madrasah Headmaster Based on Pesantren Culture. *QIJIS (Qudus International Journal of Islamic Studies)*, 5(2).
- Novitasari, M., Budiayanti, R. T., & Sriatmi, A. (2022). Kesiapan Akreditasi Klinik Pratama Dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan. *Link*, 18(1), 1–9.
- Rulitawati, Ritonga, A. H., & Hasibuan, L. (2020). Management Performance Model of High School Teachers of Muhammadiyah in South Sumatera. *International Journal of Educational Review*, 2(3).
- Sanusi, H. P. (2020). Madrasah Quality Improvement Evaluation Strategic Management Based. *International Journal of Nusantara Islam*, 8(2), 137–145.
- Schles, R. A., & Robertson, R. E. (2019). The Role of Performance Feedback and Implementation of Evidence-Based Practices for Preservice Special Education Teachers and Student Outcomes: A Review of the Literature. *Teacher Education and Special Education: The Journal of the Teacher Education Division of the Council for Exceptional Children*, 42(1), 36–48.
- Siregar, M. Y., & Sihombing, P. (2021). The Performance Improvement and the Competitiveness of Private Universities ( PTS ) in North Sumatera through the Strategy of Building Institutional Competence. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 4(1), 639–653.
- Siswanto, S. (2022). Strengthening Spiritual Leadership in Preserving Religious Culture and Local Wisdom in Madrasah. *AL-TANZIM: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 6(3), 907–920.
- Solichin, M. (2015). Implementasi Kebijakan Pendidikan dan Peran Birokrasi. *Jurnal Studi Islam*, 6(2), 148–178.
- Steinberg, M. P., & Kraft, M. A. (2017). The Sensitivity of Teacher Performance Ratings to the Design of Teacher Evaluation Systems. *Educational Researcher*, 46(7), 378–396.
- Sudarjat, J., Abdullah, T., & Sunaryo, W. (n.d.). Supervision, Leadership, and Working Motivation to Teachers' Performance. *International Journal of Managerial Studies and Research*, 7.
- Sukmawati, S., Ujang, Y., & Soeharto, S. (2019). The Improvement of Accreditation through Evaluation on Management Standards in Madrasah Tsanawiyah Al-Anwar Pontianak. *Journal of Educational Science and Technology (EST)*, 5(1), 67.
- Surur, M., & Roziqin, M. K. (2021). Islamic Education Learning Process in Evaluation Curriculum: The Minister of Religion Decree No.183 and 184 of 2019. *SCHOOLAR: Social and Literature Study in Education*, 1(1), 2–6.
- Sutanti, D., Suparman, R., Setianingsih, T., & Laelatul Badriah, D. (2022). Studi Analisis Ketercapaian Implementasi Kebijakan Akreditasi Puskesmas Dan Kinerja Puskesmas Di Kabupaten Kuningan. *Journal of Public Health Innovation*, 2(02), 189–198.
- Taut, S., Santelices, V., Araya, C., & Manzi, J. (2010). Theory underlying a national teacher evaluation program. *Evaluation and Program Planning*, 33(4), 477–486.
- Tuerah, R. M. S. (2017, August 11). Analysis of Teacher Performance on Learning Managment in Primary School. *9th International Conference for Science Educators and Teachers (ICSET 2017)*.
- Wachidi, W., Rodgers, A., & Tumanov, D. Y. (2020). Professional Competence Understanding Level of Elementary School in Implementing Curriculum 2013. *International Journal of Educational Review*, 2(1), 99–105.
- Wene, I. W. O. A., & Muljani, R. (2020). English Teacher s ' Performance Evaluation as a Means for Their Professional Developments. *Indonesian Research Journal in Education*, 4(2), 483–497.
- Yaumi, M., Sirate, S. F. S., & Patak, A. A. (2018). Investigating Multiple Intelligence-Based Instructions Approach on Performance Improvement of Indonesian Elementary Madrasah Teachers. *SAGE Open*, 8(4), 215824401880921.
- Zaqiah, Q. Y., Suhendar, D., & Maryani, N. (2018, August 12). Evaluation of Teacher Performance to Quality Learning in Madrasah Aliyah (A Comparative Study between Madrasah Aliyah Model and Non-Model Madrasah Aliyah in West Java). *International Conference on Islamic Education (ICIE 2018)*.